

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA TANJUNG KARANG**

(SKRIPSI)

Oleh

PUTRI RAHAYU



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

ABSTRACT

GENDER MAINSTREAMING IN TAX SERVICE OFFICE (TSO) PRATAMA TANJUNG KARANG

By

Putri Rahayu

Gender issue has now become international concern including in Indonesia. Presidential Instruction No. 9 of 2000 on gender mainstreaming (PUG), impose the importance of understanding about gender issue in order to realize a good governance.

Employees are important asset for Tax Services Office, due to the growing development of the agencies depend on the performance of its officers. Directorate General of Taxes as one of the organizations under the auspices of the Ministry of Finance that participate in PUG, namely by applying the concept of Gender Responsive at the office. This research was held at Tax Services Office Pratama Tanjung Karang.

This research is arrive at knowing gender mainstreaming at Tax Services Office Pratama Tanjung Karang and analyse its implementation and also the influence facilities. This research is a descriptive research with qualitative approach by taking data from informants through interviews, observation and the documentation. The result of the research shows that gender in KPP Pratama Tanjung Karang already implemented well, by aspect of political support, policy, institutional, information systems and human resources. But there are some facilities that should be fixed, namely toilet for taxpayers as well as a smoking area however woman parking should be eliminated.

Keyword : Keywords: Gender Mainstreaming, Equality, Justice

ABSTRAK

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TANJUNG KARANG

By

Putri Rahayu

Isu Gender kini telah menjadi komitmen internasional termasuk di Indonesia. Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, menekankan pentingnya memahami tentang isu gender untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pegawai merupakan aset penting untuk kantor Pelayanan Pajak, karena tumbuh berkembangnya instansi tersebut bergantung pada kinerja para pegawainya. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu organisasi dibawah naungan Kementerian Keuangan juga turut serta mendukung terselenggaranya PUG, yakni dengan menerapkan Konsep Responsif Gender di kantornya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang, menganalisis implementasinya dan juga pengaruh dari fasilitas yang ada. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil data dari beberapa informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengarusutamaan gender yang dilaksanakan di KPP Pratama Tanjung Karang sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari aspek dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sistem informasi dan sumber daya manusia. Akan tetapi terdapat beberapa fasilitas yang harus diperbaiki yaitu toilet untuk wajib pajak serta area merokok, namun parkir wanita sebaiknya dihilangkan.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan, Keadilan

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA TANJUNG KARANG**

Oleh

PUTRI RAHAYU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK**

Pada

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

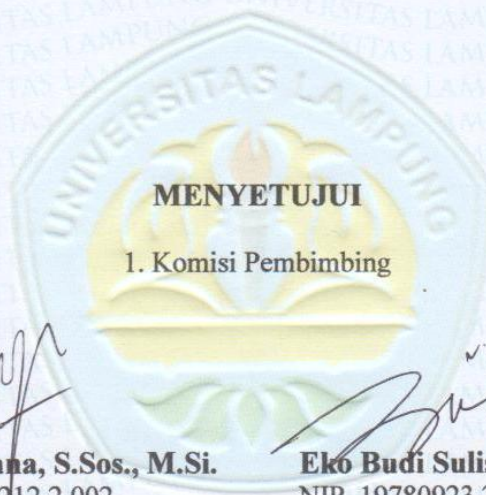
Judul Skripsi : **PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : **Putri Rahayu**

No. Pokok Mahasiswa : 1516041102

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.
NIP 19720918 200212 2 002

Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**

Penguji Utama : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandarlampung, 16 April 2019

Yang membuat pernyataan,



Putri Rahayu

NPM. 1516041102

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Rahayu namun kerap disapa Putri, lahir di Kota Bandar Lampung tanggal 19 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang dilahirkan oleh pasangan Ayahanda Herijan dan Ibunda Fitri Suhartati. Meski lahir dan besar di Lampung, penulis tidak bersuku Lampung asli, namun bersuku campuran yaitu Suku Jawa dari Ayahanda dan Suku Bali dari Ibunda. Pada tahun 2002-2003 penulis mulai mengenyam pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Bhayangkari. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar pada tahun 2003-2009 di SDN 1 Palapa Bandar Lampung. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di SMP 25 Bandar Lampung pada Tahun 2009-2012. Sekolah Menengah Atas di SMA 16 Bandar Lampung pada Tahun 2012-2015. Kemudian diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Tahun 2015 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Keikutsertaan penulis dalam organisasi kampus dimulai sejak bergabung dengan divisi Danus (Dana dan usaha) Himagara (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) FISIP Universitas Lampung pada saat Semester 1. Pada Semester 3 dan 5 bergabung dengan Divisi Mikat (Minat dan Bakat). Penulis juga cukup aktif dalam mengikuti beberapa acara kemahasiswaan di HIMAGARA, salah satunya menjadi

Koordinator Acara pada Kegiatan Pelatihan Desain Grafis Dengan Tema “*Creativity in Activity*”. Tidak hanya organisasi di tingkat Jurusan, Penulis juga bergabung dengan organisasi tingkat Fakultas yaitu *English Club* pada semester 1. Perjalanan panjang dalam masa perkuliahan telah penulis lalui dikampus tercinta. Semua dilakukan karena ingin membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua, meski banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi namun penulis yakin bahwa ujian tersebut merupakan sebuah proses indah yang harus dilalui. Penulis yakin semua tantangan dan rintangan akan selalu memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya.

MOTTO

Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit

(Nabi Muhammad S.A.W)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah 5-6)

Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketika, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

(Anonim)

Tak perlu iri dengan kehidupan orang lain, yang terpenting setiap hari kita harus memiliki *progress*

(Putri Rahayu)

Selalu bersyukur dengan apa yang kita hasilkan, karena orang lain hanya melihat hasil tanpa mengetahui betapa beratnya sebuah proses

(Putri Rahayu)

Niat adalah suatu tombak yang akan membawa kita menjadi lebih baik

(Putri Rahayu)

Optimis dengan apa yang kita kerjakan sebelum orang lain meremehkanmu

(Putri Rahayu)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT

Maha syukur ku kepada Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan keteguhan hati yang tak pernah lelah mengiringi kehidupanku selama ini

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang menyayangiku:

Ayah dan Ibu Tercinta

Yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.

Adikku, Sukma Maulana

Yang selalu menyemangati dan contoh baik

Segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepadaku

Para dosen dan Civitas Akademika

Sahabat-sahabat yang selalu menemaniku saat suka maupun duka

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa agar bisa sukses kedepannya

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T beserta rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengarusutamaan Gender di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis selalu mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari pihak pembaca. Penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud dari rasa hormat dan penghargaan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak bu atas curahan ilmu, arahan dan kasih sayang ibu dalam pengerjaan skripsi penulis. Semoga kebaikan ibu kembali lagi pada ibu, Aamiin.
2. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing Kedua penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak pak atas waktu, arahan dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini. Semoga kesabaran yang bapak berikan membawa berkah, Aamiin.

3. Ibu Dra. Dian Kaagungan M.H Selaku penguji penulis yang sangat baik hati. Terimakasih bu atas motivasi, kebaikan dan kasih sayang ibu kepada penulis. Semoga kebaikan ibu kembali lagi pada ibu, Aamiin.
4. Bapak Dr. Syarif Makhya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang banyak membantu memberikan kemudahan kepada penulis semasa kuliah.
6. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas semangat dan kebaikan hati ibu untuk memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen pengajar atas bimbingan ilmu yang telah diberikan, dan para karyawan yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama kuliah.
8. Ibu Winda Febrianti, Bapak Arfinsha Finka Perdana, Ibu Syaiddatur Rahmawati, Bapak Hamdan AR, Ibu Intari, Ibu Dian S, Bapak Adimas Rizky, Ibu Adisti Putri, Ibu Sri Rejeki, Bapak Mustofa Hazy, Bapak Adi Saputra, Bapak Edi, Ibu Puput, Bapak Askabul, Bapak Hasan Basyuni, Ibu Selfi Haryani, Ibu Tika, Ibu Heni, Bapak Agus, Ibu Ade Muthia Putri, Bapak Hairudin, Ibu Putri Puspita Handayani dan Ibu Heni selaku pihak informan yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data-data penelitian.
9. Kedua orang tuaku Ayahanda Herijan dan Ibunda Fitri Suhartati yang baik hati dan penuh kasih sayang. Terimakasih atas dukungan finansial, kesabaran dan kasih sayang yang tidak ada batasnya yang telah kalian curahkan kepada penulis. Penulis bersyukur memiliki orang tua seperti kalian.

10. Adik kandung penulis, Sukma Maulana yang sudah beranjak dewasa. Terimakasih untuk amunisi yang diberikan untuk penulis saat proses mengerjakan skripsi karena berfikir butuh asupan.
11. Aji, Ria, Mele dan Yunput, teman seperjuangan penulis yang jarang sekali bertemu dan hanya bertegur sapa secara *online*, kita jauh dimata namun dekat dihati.
12. Intan, Rizcha, Vicka dan Mahda, sahabat penulis yang menemani hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di jurusan Administrasi Publik sehingga penuh warna. Semangat berjuang jangan mau dikalahkan oleh waktu dan keadaan.
13. Fitri Chairani, si kecil lincah yang selalu mengomeli penulis disetiap waktu dan selalu mengajak penulis untuk kekantin. Semangat skripsiannya jangan pacaran terus.
14. Lidya Putri, teman seperjuangan penulis yang selalu menculik penulis karena dia tidak suka dengan kesendirian. Ayo semangat skripsiannya, maju terus pantang mundur.
15. Ayu dan Seski, kawan seperkelompokan penulis selama menempuh pendidikan di jurusan Administrasi Publik. Jangan lupa skripsiannya nanti dulu pacarannya.
16. Annisa Hidayati, kawan seperbimbinganku untuk bertemu dengan Bu Novita. Saling melengkapi dan bertukar informasi. Terimakasih Ca, perjuangan kita luar biasa.
17. Ria dan Rika, sikembar kawan seperbimbingan penulis. Terimakasih atas informasi yang saling kita berikan selama ini. Semoga kita sukses, Aamiin.
18. Vera, Indah, Sinta dan Andini, kawan penulis saat melakukan proses bimbingan. Semangat terus sayangku, kita pasti bisa.
19. Astri, Ara, Ela, Yuni dan Nabiqa, sahabat penulis yang juga sedang mengerjakan skripsi. Walaupun kita jarang bertemu, namun hati kita tetap menyatu.

20. Novita, Ferlida dan Nadia, teman penulis saat les di UPT (Unit Pelayanan Teknis) Balai Bahasa Universitas Lampung. Terimakasih seminggu berharga bersama kalian, ayo semangat pejuang wisudaku.
21. Teman-teman ATLANTIK (Angkatan Tujuh Belas Administrasi Publik) yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini, kita luar biasa.
22. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungannya.

Akhir kata semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah S.W.T dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, 02 Mei 2019

Penulis,

Putri Rahayu

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Konsepsi Pengarusutamaan Gender	14
C. Konsepsi Keadilan	20
D. Program Responsif Gender	23
E. Anggaran Responsif Gender	25
F. Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Informan Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	33

D. Lokasi Penelitian	39
E. Jenis Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Instrumen Penelitian	43
H. Proses Penelitian	44
I. Teknik Analisis Data	45
J. Keabsahan Data	47
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	52
1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	52
2. Visi-Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	53
3. Azas dan Tujuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	53
4. Data Kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	54
5. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	58
6. Data Persebaran Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	59
7. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	61
B. Gambaran Umum Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang	62
1. Program-Program PUG	62
2. Fasilitas Pendukung	63
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil dan Pembahasan	64
1. Program-Program PUG	65
a. Program Cuti Melahirkan dan Menemani Melahirkan	65
b. Program Kesetaraan	69
c. <i>Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training</i>	75
d. Fasilitas Pendukung	76
e. Anggaran Pengarusutamaan Gender	80
2. Pelaksanaan Program PUG	83

a. Program Cuti Melahirkan dan Menemani Melahirkan	84
b. Program Kesetaraan	85
c. Fasilitas Pendukung	88
d. <i>Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training</i>	105
e. Anggaran Pengarusutamaan Gender	106
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam PUG di KPP Pratama Tanjung Karang	107
a. Faktor Pendukung	107
b. Faktor Penghambat	116
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	120
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	31
2. Kelompok Jabatan Fungsional <i>Account Representative</i> (AR)	54
3. Daftar Pegawai KPP Pratama Tanjung Karang	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Angkatan Kerja Indonesia Agustus 2016	7
2. Model Analisis Data Miles dan Huberman	46
3. Komposisi Pegawai	59
4. Tingkat Pendidikan	60
5. Pengguna Ruang Laktasi	89
6. Pengguna Area Bermain Anak	91
7. Parkir Wanita	94
8. Toilet	95
9. Pengguna Area Merokok	97
10. Pengguna Loker Khusus	99
11. Poster Pengarusutamaan Gender	112

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu Gender kini telah menjadi komitmen daerah, nasional, dan internasional. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah mengalami kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di sebagian besar kementerian/lembaga. Pembangunan dengan paradigma baru yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatiannya, memerlukan strategi Pengarusutamaan Gender. Intruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, menekankan pentingnya pengarusutamaan gender untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengarusutamaan Gender merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat, agar dapat memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan, program, kegiatan yang dibuatnya untuk menyumbang kemajuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya daerah yang melaksanakannya.

Pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga (K/L) merupakan implementasi Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Inpres tersebut K/L berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan manusia dan

pembangunan. Agar suatu penyusunan kebijakan dapat mempertimbangkan aspek gender, dukungan para pejabat terkait sangat diperlukan.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 mengacu oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 dan dilanjutkan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, yang menetapkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas Bidang pembangunan, sebagai salah satu prinsip dan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan, informasi, kredit. Pengarusutamaan gender diamanatkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut Inpres tersebut, kementerian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan ketidaksetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender. (<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/51014-35739-1.-pengarusutamaan-gender.pdf> diakses pada 30 September 2018).

Pembangunan yang semula hanya bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja sekarang harus diubah menjadi paradigma pembangunan manusia yang adil,

menyeluruh dan berkelanjutan. Paradigma ini penting untuk menekankan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai pra syarat untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Laki-laki dan juga segelintir perempuan memiliki akses dan kontrol lebih besar atas berbagai sumber daya pembangunan. Mereka merumuskan kebijakan, menjabarkannya ke dalam berbagai program dan kegiatan serta merancang anggaran untuk melaksanakannya. Namun, hampir semua dari mereka tidak memiliki kesadaran dan kepekaan gender. Mereka tidak mengenali dan mempersoalkan bahwa pengalaman hidup perempuan dan laki-laki berbeda. Implikasinya mereka tidak memahami perbedaan masalah, kebutuhan, kepentingan laki-laki dan perempuan. Mereka juga tidak mengenali dan mempersoalkan perbedaan kualitas hidup perempuan dan laki-laki serta mencari akar penyebabnya (Sri Mastuti, et.al 2007:9).

Pemerintah mulai menyadari bahwa perempuan yang jumlahnya lebih dari 50 % dari penduduk Indonesia adalah sebuah potensi pembangunan yang telah disia-siakan. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk mengikut sertakan atau mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan yang dikenal dengan strategi WID (*Women in Development*). Strategi ini dijalankan sejak akhir tahun 70-an selama kurang lebih hampir tiga dasawarsa. Strategi WID cukup berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis gender saja. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang diidentifikasi berdasarkan peran perempuan dan laki-laki yang berbeda yang ditetapkan oleh budaya. Strategi WID tidak mampu menumbuhkan

keadilan dan kesetaraan gender meskipun pemenuhan kebutuhan praktis gender itu sangat diperlukan (Moser, C.,1993 dalam Sri Mastuti, et.al 2007:12-13).

Kemajuan perempuan dan kesetaraan gender adalah hak asasi manusia. Keadilan dan kesetaraan gender dapat dicapai melalui perencanaan yang baik dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Keadilan gender adalah suatu perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perlakuan yang adil bukan berarti keduanya diperlakukan sama, karena laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak sama. Masalah, kebutuhan, dan kepentingan antarapemempuan dan laki-laki tidak dapat disamakan.

Demi terwujudnya keadilan gender maka diperlukan upaya agar perempuan dapat memperoleh akses dan kontrol sama seperti laki-laki. Upaya tersebut dapat berupa program dan kegiatan yang adil tetapi tidak dalam pengertian netral gender seperti yang selama ini diyakini. Program dan kegiatan tersebut harus dibuat didasarkan pada tujuan untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Perumusan kebijakan gender dan tujuan kebijakan yang responsif gender. Keadilan gender akan mengantar kepada kesetaraan gender yaitu situasi ketika perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk merealisasi hak-hak dan kemampuannya dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kesetaraan gender bukan tujuan pembangunan, tetapi prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan manusia yang adil, menyeluruh dan berkelanjutan (WSP II, 2000 dalam Sri Mastuti, et.al 2007:15).

Sebagai reaksi terhadap kegagalan strategi WID, pada tahun 1990-an berkembang pendekatan gender dan pembangunan atau GAD (*Gender and Development*). Pendekatan ini menekankan pada kenyataan bahwa peran perempuan dan peran laki-laki berbeda. Dengan demikian pendekatan GAD adalah pendekatan yang sensitif gender karena selain mengenali dan mempersoalkan perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki juga harus mengenali dan mempersoalkan kesenjangan relasi di antara keduanya dan mencari akar penyebabnya sehingga dapat diupayakan penghapusannya. Indikator gender dapat diperoleh jika tersedia data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin di berbagai bidang kehidupan. Pembangunan dengan paradigma baru yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatiannya, memerlukan strategi pengarusutamaan gender. Inpres No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender menekankan pentingnya pengarusutamaan gender untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan publik. Tujuan pengarusutamaan gender adalah mengubah kebijakan lembaga-lembaga/ organisasi-organisasi menjadi lembaga/ organisasi dengan struktur dan sistemnya yang responsif gender (Sri Mastuti, et.al 2007:16-19).

Kegagalan untuk merealisasikan potensi separuh penduduk berarti kerugian bagi pembangunan itu sendiri, dengan demikian pentingnya mengatasi isu kesenjangan gender bukan saja terkait dengan masalah hak asasi manusia dan keadilan, tetapi juga masalah efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan. Dapat

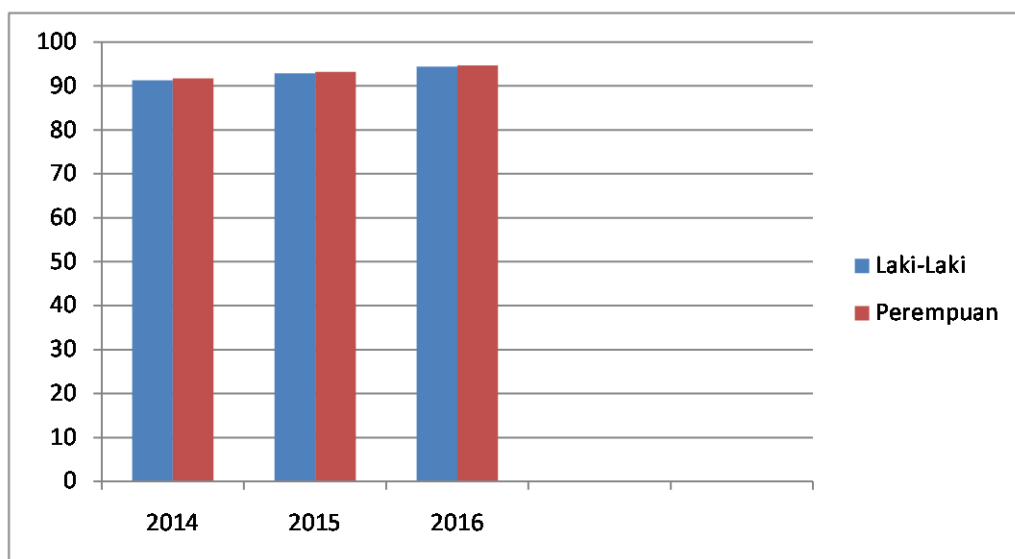
kita lihat bahwa IKG (Indeks Ketimpangan Gender) Provinsi Lampung Tahun 2016 melebihi IKG.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat provinsi, kondisi ketimpangan gender sangat bervariasi. Dalam kurun waktu 2015-2016, disparitas antarwilayah cenderung menurun. Di tahun 2015, IKG provinsi berkisar antara 0,574 hingga 0,110. Sedangkan pada tahun 2016 berada pada posisi 0,558 hingga 0,212. Hal ini berarti terjadi penurunan disparitas jika diukur menurut rentang (range). Rentang IKG tahun 2016 berada pada angka 0,346, sedangkan sebelumnya berada pada angka 0,466. Propinsi Lampung memiliki IKG yang tinggi melebihi rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa Propinsi Lampung mengalami kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender.

Lembaga/organisasi arusutama mengupayakan kemajuan di berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial, budaya, agama, lingkungan dimana perempuan dan laki-laki sama-sama berkiprah di dalamnya secara adil dan menikmati kemajuan tersebut. Perbedaan akses dan peluang dalam memasuki sektor publik dilihat dari perspektif gender. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKG nasional tahun 2015 adalah 0,466. Nilai ini mencerminkan bahwa kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender terkait dengan kualitas hidup dan pemberdayaan di Indonesia adalah sebesar 46,6 persen. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan peran laki-laki dengan perempuan yang cukup signifikan dalam pembangunan. Dapat kita lihat

bahwa angkatan kerja indoneia pada tahun 2014,2015 dan 2016 komposisi penduduk perempuan dan laki-laki hampir sama seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Angkatan Kerja Indonesia, Agustus 2016



Sumber : *BPS,2017*

Jika IKG dikaitkan dengan ketenagakerjaan, dalam pembangunan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender akan mempengaruhi optimalisasi pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan kesenjangan gender tidak akan mencapai potensinya yang optimal. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat populasi penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia cukup seimbang. Perbandingan antara Laki-Laki dan Perempuan pada tahun 2014 (91,30/91,69), tahun 2015 (92,86/93,24) dan tahun 2016 (94,37/94,72). Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 **2016**, *sex ratio* pada tahun 2015 dan 2016 mencapai 101, artinya komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) sebagai salah satu unit yang menjalankan program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kewajiban inilah yang membuat semua unit terkait mengimplementasikan PUG disetiap program yang mereka jalankan. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG.

Pegawai merupakan aset penting pada setiap kantor Pelayanan Pajak, karena tumbuh berkembangnya instansi tersebut bergantung pada kinerja para pegawainya, serta pelaksanaan tugas masing-masing bagian secara maksimal dan profesional serta kerjasama yang baik dalam setiap bagian yang ada. KPP Pratama Tanjung Karang memiliki 92 pegawai yang mendukung kinerja KPP dan terdapat beberapa bagian kerja, yang terbagi kelompok jabatan fungsional: Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Ektensifikasi, Kepala Seksi PDI, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Waskon I,II,III,IV dan terdiri dari 61 pegawai pria dan 31 pegawai wanita. Dengan adanya data ini maka dapat disimpulkan bahwa di dalam organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanjung Karang, pegawai wanita menjadi minoritas. Meskipun menjadi minoritas, pegawai wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan pegawai pria di setiap organisasi dibawah naungan Kementrian Keuangan (Sub Bagian Umum KPP Pratama Tanjung Karang,2019).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu organisasi dibawah naungan Kementrian Keuangan juga turut serta mendukung terselenggaranya PUG, yakni dengan menerapkan Konsep Responsif Gender. Konsep Responsif Gender adalah

suatu konsep dimana suatu kebijakan/program/kegiatan yang akan direncanakan dan dilakukan, harus memperhatikan berbagai pertimbangan demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan, tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan, tetapi juga dalam hal usia, sosial-ekonomi, dan/atau suku bangsa. Konsep ini juga diterapkan diseluruh organisasi dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang. Menurut informasi dari seorang informan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang telah memiliki Ruang Laktasi yaitu suatu bentuk nyata dari pelaksanaan Responsif Gender. Selain ruang laktasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang juga memberikan kesamaan proporsi penerimaan CPNS Pajak, parkir khusus wanita, jalur khusus difabel, toilet terpisah, dan penyediaan dalam karir dan jabatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah program di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung telah responsif gender atau belum, sehingga kajian ilmiah dalam penelitian ini berisi tentang: **“Pengarutamaan Gender (PUG) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya:

1. Apa sajakah program-program terkait Pengarusutamaan Gender di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang?

2. Bagaimanakah pelaksanaan program-program Pengarusutamaan Gender di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang?
3. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi dalam Pengarusutamaan Gender di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program apa sajakah yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang terkait Pengarusutamaan Gender.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di KPP Pratama Tanjung Karang.
3. Untuk mengetahui apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam Pengarusutamaan Gender di KPP Pratama Tanjung Karang

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara akademis, hasil penelitian digunakan untuk menambah wawasan dan penelitian yang baru dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya khususnya disiplin analisis kebijakan publik.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini digunakan sebagai rekomendasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang agar meningkatkan program dan layanan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender yang lebih baik lagi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan oleh penelitian sebelumnya yang mengambil topik tentang pengarusutamaan gender dalam ketenagakerjaan. Penelitian pertama dilakukan oleh Anjas Asmara (2016) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013)”. Anjas melihat keterlibatan perempuan sebagai indikator capaian kinerja dan standar akuntabilitas guna mewujudkan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) melalui PNPM Mandiri Perdesaan Braja Sakti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan PNPM Mandiri berwawasan gender di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung timur belum sepenuhnya maksimal dan perlu dilakukan pembenahan. Hal ini terlihat dari masih banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya untuk itu, perlu adanya perbaikan dari anggaran, sosialisasi mengenai kebijakan, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia yang menjadi agen pelaksana, agar kebijakan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari fokus yang ingin dituju, jika penelitian terdahulu melihat

capaian kinerja perempuan dan standar akuntabilitas sedangkan penelitian sekarang peneliti ingin mengetahui pengarusutamaan gender secara keseluruhan mulai dari program, prinsip, pelaksanaan serta pendukung dan penghambat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mutiara Septiani Eka Putri (2018) yang berjudul “Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan di Provinsi Lampung”. Mutiara berangkat dari kenyataan bahwa tingkat pengangguran perempuan di Provinsi Lampung masih lebih tinggi daripada laki-laki. Lampung memerlukan adanya pemberdayaan terhadap perempuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan perempuan agar dapat mengejar ketertinggalan dari laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi PUG diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan, dengan kegiatan Pembinaan Bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif berupa pelatihan pengolahan potensi alam setempat menjadi produk makanan maupun kerajinan yang bernilai jual tinggi untuk meningkatkan kualitas perempuan miskin desa serta Penilaian Lomba P3KSS yang dilaksanakan secara merata di Provinsi Lampung. Implementasinya terkendala keterbatasan anggaran, tidak ada kerjasama dengan pihak swasta, belum adanya LSM yang konsentrasinya pada peningkatan kualitas perempuan pada bidang ekonomi, sering terjadi mutasi pelaksana, serta kesadaran dan konsistensi sasaran program yang belum terbangun secara maksimal. Dinas PPPA perlu melakukan upaya khusus dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta, mendorong terbentuknya lembaga perempuan yang konsentrasi pada bidang

ekonomi perempuan, memperluas sasaran penguatan kelembagaan PUG, membuat fokus waktu dalam pelaksanaan program yang efektif dalam 5 tahun, serta perempuan di Provinsi Lampung harus berpikir maju dan mandiri. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya ingin mengetahui siapa yang mengimplementasikan rencana strategis yang telah disusun, bagaimana program, anggaran, dan prosedur yang dijalankan dengan mendorong lembaga perempuan yang berkonsentrasi pada bidang ekonomi sedangkan penelitian sekarang ingin mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak hanya untuk perempuan tetapi juga laki-laki, difabilitas dan anak-anak melalui kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan dan jabatan serta pemenuhan fasilitas untuk kebutuhannya.

B. Konsepsi Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Pengertian Gender

Gender merupakan suatu konsep yang menunjukkan perbedaan peran, tingkah laku, dan hak-hak yang dikonstruksikan oleh masyarakat oleh perempuan dan laki-laki (Sri Mastuti et. al 2007:80). Perbedaan akses dan peluang dalam memasuki sektor publik dilihat dari perspektif gender. Sedangkan menurut Deaux dan Kite (1987) gender merupakan bangunan sosial dan kultural yang pada akhirnya membedakan antara karakteristik maskulin dan feminin (Partini 2013).

Gailey (1987) dalam Demartoto (2009:22) berpendapat menurut perspektif gender perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki berakar pada ideologi gender. Davis (1991) dalam Partini (2013:17) mengatakan bahwa maskulin dan

feminin bersifat relatif, tergantung pada konteks sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Konsep gender muncul karena para ilmuwan sosial melihat bahwa subordinasi perempuan merupakan hal yang umum dan berjalan bertahun-tahun dengan keuntungan di pihak laki-laki sehingga nyaris menjadi sebuah ideologi.

Gender dilihat sebagai bentuk-bentuk khusus yang menggambarkan ketidaksetaraan sosial dan usaha-usaha yang dibuat untuk menjelaskan ketidaksetaraan gender dalam kaitannya dengan kapitalisme dan atau patriarki. Teorisasi sosiologis mengenai gender, ditandai oleh ketegangan antara teori kaum idealis dengan materialis dan antara mereka yang melihat gender sebagai perbedaan dengan mereka yang memandang kekuasaan yang bersifat gender sebagai dasar hubungan gender (Scott 2013:114).

Sadli (1982) menyatakan bahwa Ideologi gender merupakan ideologi yang mengkotak-kotakkan peran dan posisi ideal perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Peran ideal inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang baku dalam stereotip. Ideologi gender seringkali memojokkan perempuan ke dalam sifat feminin, yaitu karakteristik kepantasan yang dianggap sesuai dengan keperempuanannya. Dampaknya ialah segala sesuatu yang sejalan dengan ideologi gender mendatangkan perasaan aman bagi sebagian terbesar laki-laki dan sebagian kecil perempuan. Karakteristik kepantasan yang berlaku didalam masyarakat, dan semakin baku ini, berkaitan erat dengan kebudayaan setiap daerah karena gender yang berlaku didalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat yang bersangkutan (Partini 2013:17).

Konsep dalam gender terbagi menjadi 2, yaitu: konsep *nature* dan konsep *nurture*

a. *Nature*

Secara etimologi *nature* diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sifat dasar manusia. *Nature* juga dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang kekuatan biologis yang mengatur perkembangan manusia. *Nature* dapat diartikan sebagai faktor kepribadian yang berkembang secara alami dan dipengaruhi oleh genetik. Dalam kajian gender, *nature* diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis. Dinyatakan sebagai teori *nature* karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara alami (<http://digilib.unila.ac.id/3987/15/BAB%20II.pdf> diakses pada 30 September 2018).

b. *Nurture*

Secara etimologi *nurture* berarti kegiatan perawatan atau pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak. *Nurture* dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang kekuatan lingkungan yang mengatur perkembangan manusia. *Nurture* dapat berupa lingkungan keluarga, masyarakat bahkan faktor ekonomi dan budaya (<http://digilib.unila.ac.id/3987/15/BAB%20II.pdf> diakses pada 30 September 2018).

Menurut Deaux dan Kite (1987) gender dapat berlangsung didalam masyarakat kerana didukung oleh sistem kepercayaan gender (*Gender believe system*) sistem kepercayaan gender ini didasarkan pada sejumlah kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki yang maskulin dan perempuan yang feminin. Sistem ini mencakup sikap terhadap peran dan perilaku yang baku dan sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Pola baku inilah yang akhirnya membentuk satu stereotip, suatu pengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan. Sistem kepercayaan gender elemen deskriptif, yaitu kepercayaan tentang bagaimana “sebenarnya” laki-laki dan perempuan, serta bagaimana “seharusnya” laki-laki dan perempuan bersikap. Setiap masyarakat memiliki citra yang jelas tentang bagaimana “seharusnya” laki-laki dan perempuan. Suatu penelitian yang dilakukan oleh William dan Best membuktikan bahwa meskipun gender tidak bersifat umum atau universal tetapi generalisasi atas pandangan kultur tetap ada. Pada umumnya laki-laki dipandang lebih kuat dan aktif, mempunyai keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu, memiliki dominasi, otonomi dan agresif. Sebaliknya perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif. Mereka bersifat mengalah dan afiliasif serta lebih memperhatikan lingkungan (Partini 2013:18).

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa gender bukanlah tentang jenis kelamin perempuan atau laki-laki, namun gender merujuk kepada cara perempuan dan laki-laki berperilaku. Keadilan gender diperlukan karena kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Tidak semua aspek yang diberi label maskulin untuk laki-laki, dan label feminin untuk perempuan dapat diterima dan berlaku untuk masyarakat Indonesia.

2. Landasan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), terdapat beberapa isitilah yang dapat kita temukan, antara lain dalam :

- a. INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

“Komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan oleh ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berperspektif gender, sumber daya manusia yang memiliki gender *analysis skill* dan sumber dana yang memadai, data dan statistik gender, alat dan sistem monitoring dan evaluasi, media KIE, serta peran serta masyarakat”

- b. Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah”

Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun dengan tujuan untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG bertujuan untuk meniadakan kesenjangan gender

dengan harapan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyat dapat meningkat, dimana sasaran utamanya adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah.

3. Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000, tujuan pengarusutamaan gender antara adalah :

1. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.
2. Memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalitas, sebagai akibat dari bias gender.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah untuk melakukan tindakan yang sensitif gender dibidang masing-masing.

Sasaran utama PUG adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan program dan kegiatan serta perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga.

C. **Konsepsi Keadilan**

1. Teori Keadilan

Menurut Plato keadilan adalah salah satu dari empat kebajikan pokok atau keutamaan yang harus dimiliki oleh setiap individu dan oleh seluruh kelas dan golongan dalam negara ideal. Oleh sebab itu keadilan merupakan salah satu kebajikan pokok atau keutamaan perorangan dan masyarakat. Keadilan mempertautkan ketiga kebijakan pokok atau keutamaan lainnya, yakni pengendalian diri, keperkasaan dan kebijaksanaan atau kearifan, karena keadilan haruslah menjadi keutamaan bagi seluruh bagian jiwa dan bagi semua kelas dalam negara. Keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Dengan kata lain, keadilan bukanlah konsep hukum. Plato mengatakan ada keadilan perorangan dan ada keadilan seluruh negara. Sebuah negara lebih besar dari seseorang maka barangkali lebih besarlah keadilan didalam negara dan oleh sebab itu lebih mudah dipahami. Marilah kita memeriksa terlebih dahulu apakah keadilan itu di dalam negara; kemudian barulah kita mengujinya dalam manusia perorangan, untuk mendapatkan keserupaan dari yang lebih besar itu di dalam bentuk yang lebih kecil (Rapar 2001:72-75).

a. Keadilan Dalam Negara

Untuk menemukan karakter dan sifat dasar keadilan dalam negara, pertamanya Plato menunjuk kepada asal mula terbentuknya negara yang dibahasnya secara analitikal ekonomis dan bukan secara historis. Plato mulai dengan melihat keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ia menunjuk kepada fakta bahwa manusia

tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang begitu banyak dan yang begitu beraneka ragam dengan kemampuan dan keterampilannya sendiri. Oleh sebab itu, pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya demi kepentingan masing-masing. Kemudian mereka lalu bersepakat untuk bekerja sama sesuai bakat, kemampuan, dan keterampilan masing-masing di suatu tempat yang didiami bersama dan selanjutnya lahirlah apa yang disebut negara itu. Jelaslah sudah bahwa negara lahir oleh karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan yang begitu beragam. Kebutuhan yang paling utama ialah makanan, yang kedua ialah perumahan, yang ketiga ialah pakaian, dan baru menyusul kebutuhan lainnya.

Pembagian kerja yang diatur sesuai dengan bakat, bidang keahlian, dan keterampilan setiap warga negara itulah yang disebut keadilan. Berfungsinya kelas yang menghasilkan uang, para pembantu, dan para penjaga sebagaimana mestinya, yang masing-masing melakukan tugasnya didalam negara merupakan keadilan yang akan menjadikan negara itu adil (Rapar 2001:76).

b. Keadilan Individu

Keadilan adalah kebajikan pokok yang harus menjadi keutamaan bagi ketiga bagian jiwa manusia yang sekaligus mengikat kesatuan dari ketiga bagian jiwa itu. Keadilan individual hanya tercapai lewat penguasaan diri. Penguasaan diri itu hanya terjadi apabila bagian rasional dapat mengendalikan kedua bagian jiwa lainnya, yaitu bagian semangat atau keberanian dan bagian keinginan atau nafsu. Apabila seseorang sanggup menguasai dirinya, maka ia akan berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan panggilannya yang ditentukan oleh bakat,

kemampuan, dan keterampilannya. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa keadilan individual ialah berfungsinya seseorang yang sanggup menguasai diri sesuai dengan panggilannya yang ditentukan oleh bakat, kemampuan, dan keterampilannya (Rapar 2001:76-77).

2. Tujuan Keadilan

Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan upaya untuk menghentikan hal-hal yang secara sosial dan histories menghambat perempuan memperoleh akses dan kontrol atas berbagai sumber daya strategis seperti ekonomi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan, informasi, hukum, dan politik. Upaya tersebut berupa program dan kegiatan yang adil tetapi tidak dalam pengertian netral gender seperti yang selama ini diyakini. Program dan kegiatan tersebut harus dibuat berdasarkan pada tujuan untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Perumusan kebijakan gender dan tujuan kebijakan yang responsif gender tersebut harus dilakukan dengan menggunakan analisis gender. Menurut WSP II (2000) keadilan gender akan mengantar kepada kesetaraan gender yaitu situasi ketika perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk merealisasi hak-hak dan kemampuannya dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesetaraan gender bukan tujuan pembangunan, tetapi prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan manusia yang adil, menyeluruh dan berkelanjutan (Sri Mastuti et.al 2007:15).

3. Hubungan Keadilan dengan Gender

Kesetaraan gender merupakan bentuk kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai peran yang dikonstruksi oleh sosial budaya masyarakat seharusnya terlepas dari tindakan diskriminasi. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengapresiasi kewajiban dan haknya (Remiswal 2013:7).

Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang melekat erat dengan potensi yang dimiliki oleh seorang individu. Dengan wawasan gender maka keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan adalah sebagai bentuk perwujudan dari hak manusia sebagai makhluk sosial dan budaya.

D. Program Responsif Gender

Isu gender merupakan permasalahan yang muncul akibat adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak, baik perempuan atau laki-laki (KPP & PA, Tahun 2010 dalam panduan PPRG Kementerian Keuangan). Pengarusutamaan gender di KPP dilakukan dengan menggunakan indikator PUG berupa:

- a. Aspek Dukungan Politik, merupakan dukungan politik dari kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Kantor Pusat yang membuat program pengarusutamaan gender. Komponen yang ditelaah antara lain adalah komitmen pimpinan tentang penjabaran pengarusutamaan gender kedalam

rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang mendukung terhadap pelaksanaan PUG;

- b. Aspek Dukungan Kebijakan, merupakan dukungan yang ada pada kebijakan/program/kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang, yaitu dilihat dari pembuatan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender (parkir prioritas, jalur khusus difabel, pembuatan ruang laktasi yang memadai untuk pegawai dan stakeholder). Apakah kebijakan/program/kegiatan pokok yang responsif gender telah terjabarkan ke dalam dokumen Rencana Lima Tahunan dan dokumen Rencana Tahunan (dalam bentuk rincian kegiatan dan dana); apakah kebijakan/ program/ kegiatan yang responsif gender semakin bertambah dan terus dilaksanakan;
- c. Aspek Dukungan Kelembagaan, merupakan potensi PUG untuk dapat terus terlaksana (*sustained*) di KPP tersebut, antara lain dapat dilihat dari komponen: tingkat otoritas dari unit kerja terstruktur yang menangani PUG; keberadaan unit kerja fungsional, sifat dari unit PUG yang ada, apakah terintegrasi ke dalam struktur atau masih bersifat *ad hoc* (satu tujuan);
- d. Aspek Dukungan Sistem Informasi, merupakan tingkat dukungan serta ketersediaan dana dan sarana bagi pelaksanaan PUG, antara lain yang mencakup: ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin; pelaksanaan advokasi/sosialisasi; serta pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) internal maupun eksternal mengenai PUG;
- e. Aspek Dukungan SDM, merupakan kapasitas sumber daya manusia yang ada, yang mampu melaksanakan PUG.

Kelima aspek tersebut adalah indikator untuk mengukur perspektif gender (*gender mainstreaming*). Adanya diskriminasi atas indikator yang telah dijelaskan tersebut menyebabkan kondisi yang tidak adil gender.

E. Anggaran Responsif Gender

Salah satu komponen utama dalam pengarusutamaan gender adalah suatu anggaran pembangunan yang juga harus responsif gender. Anggaran pembangunan adalah dana yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan.

Pada masa lalu pemerintah mengalokasikan 1 % dari anggaran belanja negara untuk pembangunan untuk upaya menggintkan perempuan dalam kegiatan pembangunan yang dikenal dengan Peningkatan Peranan Wanita (P2W). Dana ini disalurkan pada Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan semua departemen dan lembaga-lembaga pemerintah non-departemen untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan. Permendagri No. 132 Tahun 2003 telah mengubah dana 1 % menjadi 5 % untuk upaya pemberdayaan perempuan . Sisanya 95 % adalah alokasi anggaran yang menurut para perencana dan pembuat keputusan adalah anggaran yang netral gender (Sri Mastuti, et.al 2007:25).

Kebijakan anggaran pembangunan, seperti halnya kebijakan pembangunan, sering diasumsikan akan berdampak sama terhadap semua orang, perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, seringkali suatu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat oleh pemerintah dan diajukan ke DPR atau DPRD menjadi

anggaran yang netral gender. Suatu anggaran yang tidak berpihak kepada siapapun yang secara implisit anggaran itu dibelanjakan untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki (Sri Mastuti, et. al 2007:25).

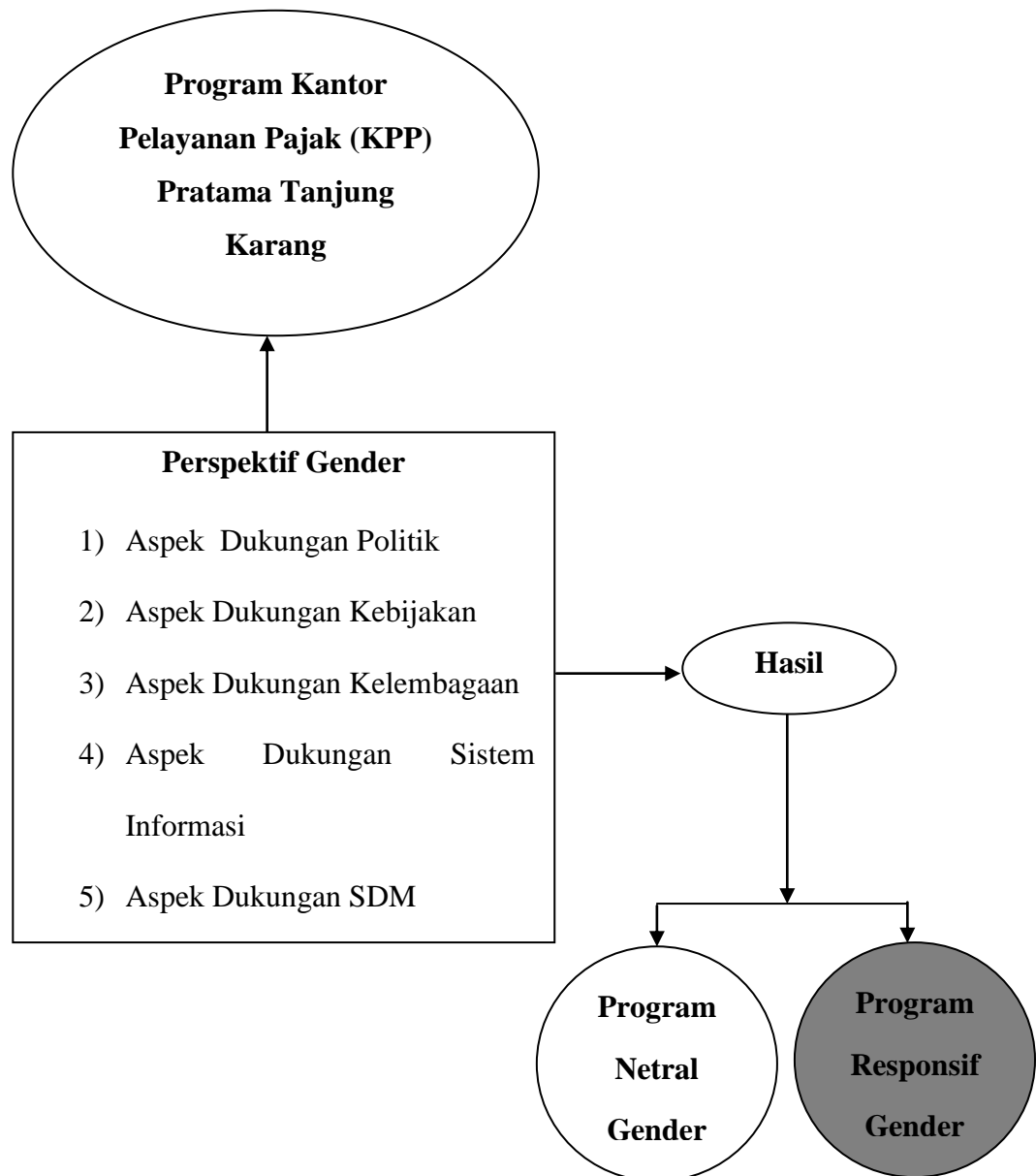
Dalam pengarusutamaan gender, terutama dalam merancang dan mengesahkan RAPBN dan RAPBD, seharusnya dapat menggunakan analisis anggaran yang sensitif gender sesuai dengan tujuan kebijakan responsif gender yang telah dibuat. Dalam analisis anggaran yang sensitif gender, data terpilah menurut jenis kelamin sangat diperlukan untuk penyusunan kebijakan dan anggaran yang tidak netral gender. Data tersebut akan memperlihatkan siapa yang bekerja, siapa yang mendapat subsidi, beasiswa, tunjangan anak fasilitas perumahan, transportasi, kesehatan dan sebagainya dan siapa pula yang tidak memperolehnya.

Meskipun implementasi anggaran responsif gender di Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan, namun dalam perkembangannya dapat dicatat beberapa kemajuan yang cukup berarti. Salah satunya adalah Ketetapan MPR No. VI Tahun 2002 yang merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan anggaran nasional guna mendukung program pemberdayaan perempuan sampai dengan 5 (lima) persen, melanjutkan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan anak serta merumuskan kebijakan, kerangka kerja hukum dan program khusus guna peningkatan keterwakilan perempuan paling tidak 30 persen dalam tingkat pengambilan keputusan. Menurut Panduan Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Jakarta (2005) selaras dengan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2002 tersebut, Keputusan Menteri Dalam

Negeri No, 132 Tahun 2003 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah, menetapkan bahwa seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan pada dana APBN dan APBD untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota sekurang-kurangnya 5 % dari APBD propinsi, kabupaten dan kota (Sri Mastuti, et.al 2007:49).

Pada tingkat nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.124,2 milyar untuk membiayai pelaksanaan program-program yang secara langsung terkait dengan pengarusutamaan gender yakni Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan oleh 9 Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan KOMNAS HAM sebesar Rp.98,2 milyar. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.16,3 milyar. Mengingat bahwa kesinambungan anggaran responsif gender sangat penting dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan (Sri Mastuti, et.al 2007:50).

F. Kerangka Pikir



Data Peneliti, 2018

III.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008:20) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalah dengan menggunakan data empiris. Penelitian yang bermaksud membuat “penyandraan” secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu. Penelitian deskripsi sering disebut penelitian survei.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Pemaknaan ini merupakan hasil interaksi sosialnya.

Menurut Berg (2001) penelitian kualitatif berupaya mencari jawaban berbagai permasalahan dalam latar sosial dan kebiasaan individu yang berada dalam latar sosial ini. Penelitian kualitatif tertarik pada bagaimana manusia mengatur diri dan bagaimana masyarakat mengatur latar sosialnya melalui simbol-simbol, ritual, struktur sosial, peran sosial, dan sebagainya. Mouton and Marais (1996) menambahkan bahwa penelitian kualitatif seringkali meneliti hubungan antara teori dan praktik sosial dengan berusaha menemukan pola-pola umum yang berlaku dimasyarakat (Martono 2015:212).

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dari individu, buku, dan sumber lain. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data agar peneliti mampu menggali informasi lebih dalam mengenai interpretasi individu yang ditelitinya.

Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi, kataristik berwujud pertanyaan atau kata-kata. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat. Pada dasarnya kegiatan manusia dan atributnya, seperti ; gagasan, kebiasaan, adat istiadat, keyakinan yang diteliti dalam penelitian sosial tidak dapat diukur dengan cara yang tepat. Namun ini bukan berarti data tersebut kurang berharga daripada data kualitatif; melainkan ini merupakan wujud kekayaan dalam studi ilmu sosial. Penelitian kualitatif tergantung pada definisi yang cermat mengenai makna kata-kata, pengembangan konsep dan variabel (Martono 2015:64).

Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara puposive dan untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan program yang responsif gender.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengarusutamaan gender yang ada di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang secara mendalam. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender.

B. Informan Penelitian

Menurut Kumar (1989) dalam Martono (2015:120) informan merupakan orang yang memberikan informasi secara lengkap dalam proses penelitian mengenai berbagai hal yang ingin diketahui peneliti, sedangkan responden dimaknai sebagai orang yang memberikan respon atas rangsangan atau stimulus yang diberikan peneliti. Informan memiliki peran seperti: menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti; memperkenalkan atau menghubungkan peneliti dengan orang lain yang memiliki pengetahuan yang sama; menyediakan akses dan meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai berbagai hal dilokasi penelitian; dan membantu menafsirkan makna pengamatan peneliti. Dalam penelitian ini informannya adalah pimpinan terkait dan pegawai yang bekerja di KPP Pratama Tanjung Karang sebagaimana disebutkan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Keterangan
1.	Winda Febrianti	27 tahun	Pelaksana Sub Bagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal
2.	Arfinsha Finka Perdana	27 tahun	Pelaksana
3.	Syaiddatur Rahmawati	21 tahun	Pelaksana
4.	Dian S	25 tahun	Pramubakti
5.	Hamdan AR	29 tahun	Juru Sita Pajak Negara (JSPN)

6.	Adimas Rizky	27 tahun	Fungsional Pemeriksa Pajak
7.	Adisti Putri	35 Tahun	Pelaksana
8.	Sri Rejeki	23 Tahun	Pelaksana
9.	Mustofa Hazyzy	45 Tahun	Pengarah Layanan
10.	Adi Saputra	46 tahun	Satpam
11.	Edi	38 tahun	Pengguna Toilet
12.	Puput	30tahun	Pengguna Toilet
13.	Askabul	30 tahun	Pengguna Area Merokok
14.	Hasan Basyuni	75 tahun	Pengguna Loker Khusus (Lansia)
15.	Selfi Haryani	30 tahun	Pengguna Loker Khusus (Ibu Hamil)
16.	Tika	29 tahun	Pengguna Area Bermain Anak
17.	Heni	30 tahun	Pengguna Area Bermain Anak
18.	Agus	35 tahun	Pengguna Area Bermain Anak
19.	Ade Muthia Putri	20 tahun	Pengguna Parkir Wanita
20.	Hairudin	48 tahun	Satpam
21.	Putri Puspita Handayani	40 tahun	Pengguna Ruang Laktasi
22.	Heni	30 tahun	Pengguna Ruang Laktasi

Sumber: *Diolah oleh peneliti, 2018*

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung dilihat dari:

1. Program-Program Terkait PUG di KPP Pratama Tanjung Karang

a. Program Cuti Melahirkan dan Cuti Menemani Melahirkan

Program cuti melahirkan dan cuti menemani melahirkan yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang merupakan hak pegawai yang dapat diambil ketika ingin melahirkan dan menemani melahirkan. Untuk cuti melahirkan selama tiga bulan sejak tanggal cuti dibuat sedangkan untuk cuti menemani melahirkan berlaku selama sepuluh hari dari tanggal yang diajukan.

b. Program Kesetaraan

Program kesetaraan terbagi atas kesetaraan pelayanan dan kesetaraan kesempatan. Program kesetaraan pelayanan yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang merupakan pemberian pelayanan yang sama terhadap Wajib Pajak (WP) tanpa membedakan bagi perempuan maupun laki-laki. Walaupun tidak dibedakan namun dalam program ini memiliki prioritas yang harus diutamakan yaitu untuk ibu hamil, lansia dan difabel. Program

kesetaraan kesempatan ditujukan untuk pegawai karena mereka berhak mendapat kesetaraan kesempatan dalam berkarir dan mengisi suatu jabatan.

c. *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training*

Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang adalah pemberian pengetahuan, *skill* dan kompetensi. *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training* yang ada antara lain pelatihan bahasa inggris, kuliah umum perpajakan, kampanye simpatik, *coffe morning*, pelatihan *make up* dan pengajian. Hal ini diperuntukan agar pegawai dapat memperdalam ilmu baik dalam pengetahuan baik terkait pekerjaan maupun pengembangan diri.

d. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung adalah fasilitas yang disediakan oleh KPP Pratama Tanjung Karang untuk digunakan oleh wajib pajak dan pegawai. Fasilitas yang disediakan untuk wajib pajak antara lain ruang laktasi, parkir wanita, area merokok, area bermain anak, toilet dan loket khusus sedangkan fasilitas untuk pegawai adalah parkir wanita dan toilet terpisah. Fasilitas ini disediakan untuk mempermudah mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan saat berada di KPP Pratama Tanjung Karang.

e. Anggaran Pengarusutamaan Gender

Anggaran pengarusutamaan gender adalah anggaran yang dialokasikan dalam penyelenggaraan kegiatan pengarusutamaan gender. Anggaran untuk pengarusutamaan gender haruslah responsif gender dalam pengalokasiannya. Anggaran tersebut juga digunakan untuk membangun

fasilitas terkait PUG dan anggaran pengembangan pegawai berupa *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training*.

2. Pelaksanaan Program-Program PUG di KPP Pratama Tanjung Karang

a. Program Cuti Melahirkan dan Menemani Melahirkan

Pelaksanaan dari program cuti melahirkan dan cuti menemani melahirkan berkisar selama tiga bulan untuk perempuan dan 10 hari untuk laki-laki. Hal ini dikarenakan memang perempuan lebih membutuhkan waktu untuk pemulihan dan peran laki-laki untuk mendampingi melahirkan dan memberikan dukungan moralitas kepada istrinya yang akan melahirkan. Pemanfaatan sarana khusus yang mendukung kebijakan PUG seperti parkir wanita, jalur difabel, toilet, ruang laktasi, dan ruang bermain anak.

b. Program Kesetaraan

Pelaksanaan program kesetaraan pelayanan dan program kesetaraan kesempatan dapat dilihat dari keseharian pegawai dan wajib pajak di KPP Pratama Tanjung Karang. Untuk program kesetaraan pelayanan yang diperuntukan untuk wajib pajak langsung dapat dirasakan ketika telah memasuki kantor. Program kesetaraan kesempatan untuk pegawai dapat dirasakan oleh pegawai dalam menjalani pekerjaannya di kantor.

c. Fasilitas Pendukung

Pelaksanaan fasilitas pendukung di KPP Pratama Tanjung Karang dapat dinikmati oleh wajib pajak yang memerlukannya. Berdasarkan hasil observasi tentang fasilitas yang mendukung pengarusutamaan gender, peneliti mewawancarai pengguna fasilitas yang tersedia mulai dari ruang

laktasi, area bermain anak, parkir wanita, toilet, area merokok dan loket khusus (Lansia, Ibu Hamil, Difabel).

d. *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training*

Dalam pelaksanaannya *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training* sudah sesuai sebagaimana pengarusutamaan gender karena kebutuhan para pegawai tercapai dengan adanya pengembangan diri dan pengetahuan yang disediakan oleh kantor dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KPP Pratama Tanjung Karang.

e. Anggaran Pengarusutamaan Gender

Pelaksanaan anggaran Pengarusutamaan Gender ada disetiap kegiatan yang yang menyangkut pengarusutamaan gender. Anggaran ini telah dirincikan setiap pelaksanaan suatu kegiatan dan pemenuhan fasilitas yang melingkupi pengarusutamaan gender.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam PUG di KPP Pratama Tanjung Karang

a. Faktor Pendukung:

1. Aspek Dukungan Politik

Aspek dukungan politik, merupakan dukungan politik dari pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap pelaksanaan PUG. Komponen yang ditelaah antara lain adalah:

- a. Komitmen pimpinan tentang penjabaran pengarusutamaan gender kedalam rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang mendukung terhadap pelaksanaan PUG.

2. Aspek Dukungan Kebijakan

Aspek dukungan kebijakan, merupakan dukungan politik yang ada pada kebijakan/program/kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang, yaitu dilihat dari:

- a. Pembuatan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender (parkir prioritas, jalur khusus difabel, pembuatan ruang laktasi untuk pegawai dan stakeholder).
- b. Kebijakan/program/kegiatan responsif gender yang semakin bertambah dan terus dilaksanakan.
- c. Program pengarusutamaan gender yang dijabarkan dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan dan dokumen Rencana Tahunan (dalam bentuk rincian kegiatan dan dana);

3. Aspek Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan adalah unit yang menangani seputar pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang. meliputi:

- a. Tingkat otoritas dari unit kerja terstruktur yang menangani PUG.
- b. Keberadaan unit kerja fungsional.
- c. Sifat dari unit PUG yang ada, apakah terintegrasi ke dalam struktur atau masih bersifat *ad hoc*.

4. Aspek Dukungan Informasi

Dukungan sistem informasi merupakan ketersediaan informasi tentang pengarusutamaan gender yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang. meliputi:

- a. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
- b. Pelaksanaan advokasi/sosialisasi.
- c. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) internal maupun eksternal mengenai PUG.

5. Aspek Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek sumber daya manusia adalah pengetahuan para pegawai untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang. meliputi:

- a. Kapasitas sumber daya manusia yang ada, yang mampu melaksanakan PUG.
- b. Faktor Penghambat:
 1. Kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat menjadi penghambat dalam pelaksanaan PUG di kantor. Kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender yang ada di lingkungan KPP Pratama Tanjung Karang dianggap masih rendah.
 2. Fasilitas.

Fasilitas yang disediakan oleh KPP Pratama Tanjung Karang sudah cukup baik dilihat dari pengadaan dan pelaksanaannya, namun

terdapat beberapa fasilitas yang kurang sesuai dengan pengarusutamaan gender. Fasilitas yang kurang sesuai itu adalah parkir wanita, toilet dan area merokok.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung sebagai Kantor yang menaungi KPP Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung karena memiliki pegawai perempuan paling sedikit serta pegawai laki-laki paling banyak diantara KPP yang ada di Bandar Lampung namun telah menerapkan program pengarusutamaan gender dengan baik dan merupakan KPP pertama di Bandar Lampung.

E. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber

pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti (Martono 2016:65). Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan informasi langsung melalui wawancara dengan informan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang.

b. Data Sekunder

Menurut data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Ia memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Data primer merupakan data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer (Martono 2016:66). Dalam penelitian ini untuk memperkuat, melengkapi, dan mendukung data primer, peneliti mengumpulkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebagai penunjang data primer yaitu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 93/PMK.01/2018, Nota Dinas Nomor ND-310/WPJ.28/KP.03/2018, Nota Dinas Nomor ND-150/WPJ.28/KP.03/2018, Nota Dinas Nomor ND-371/WPJ.28/KP.03/2018, Sejarah, Visi-Misi, Azas, Tujuan, Data Persebaran Pegawai, Struktur Organisasi, Data Kepegawaian dan Wilayah Kerja lokasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2016:224). Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi *participant*, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi (Sugiyono 2016:293). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau data menggunakan pancaindera. Pengamatan digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. Pengamatan merupakan salah satu metode yang paling penting dari pengumpulan data dalam pengamatan, instrumen penelitian utama adalah diri (peneliti) yang secara sadar mengumpulkan data indrawi melalui penglihatan, pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan (Martono 2015:239).

Bagi peneliti kualitatif, fenomena harus mengungkapkan dirinya sendiri. Peran peneliti hanya menggambarkan fenomena tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggambarkan pengarusutamaan gender yang telah dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang. Peneliti turun langsung untuk mengobservasi pemanfaatan sarana terkait pengarusutamaan gender yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang. Sarana pengarusutamaan gender yang ada ialah ruang laktasi, parkir wanita, area bermain anak, toilet terpisah, area merokok, dan loket khusus (ibu hamil, lansia dan difabel).

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden). Dalam proses wawancara pewawancara atau *interviewer* dan informan atau *interviewees* belum saling kenal; pewawancara adalah pihak yang terus bertanya; dan pertanyaan dalam wawancara sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Philips and Stawarski (2008) dalam suatu wawancara harus terarah. Untuk itu, pewawancara perlu menyusun pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai berbagai informasi yang akan digali dari informan tersebut (Martono 2015:362-364).

Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur. Teknik wawancara mendalam (*indeep interview*) digunakan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengungkapkan data tentang pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanjung Karang.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai satu per satu informan untuk mengetahui situasi langsung yang tidak dapat diketahui peneliti melalui observasi. Pertanyaan yang ingin diketahui sesuai fokus penelitian yaitu terkait program,

pelaksanaan, pendukung serta penghambat pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen atau sering disebut metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Prior (2003) menambahkan bahwa dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, foto, rekaman pidato, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat menjadi sumber atau pokok, dapat pula hanya menjadi data penunjang dalam mengeksplorasi masalah penelitian (Martono 2015:80).

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari arsip-arsip mengenai program responsif gender di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Tanjung Karang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.01/2018, Nota Dinas Nomor ND-310/WPJ.28/KP.03/2018, Nota Dinas Nomor ND-150/WPJ.28/KP.03/2018, Nota Dinas Nomor ND-371/WPJ.28/KP.03/2018, Sejarah, Visi-Misi, Azas, Tujuan, Data Persebaran Pegawai, Struktur Organisasi, Data Kepegawaian dan Wilayah Kerja lokasi penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri sebagai subjek yang melakukan penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

H. Proses Penelitian

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a. Proses memasuki lokasi penelitian

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh data, pada tahap ini terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan meminta izin kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dan pihak informan lain yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dengan membawa surat izin formal penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu politik Universitas Lampung. Setelah itu, peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak, kemudian menentukan waktu melakukan wawancara.

b. Ketika berada dilokasi penelitian (*getting along*)

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi dan akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang lengkap serta berusaha menangkap makna dari berbagai informasi yang diterima

serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, peneliti berusaha sebijak mungkin sehingga tidak menyinggung informan secara formal maupun informal.

c. Pengumpulan data (*logging data*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

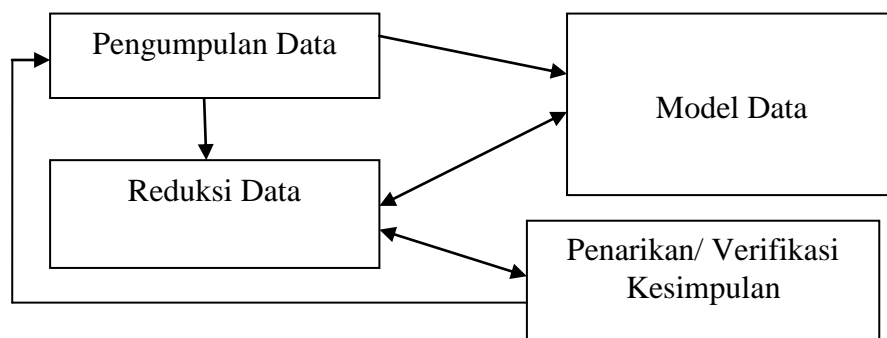
1. Observasi, tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati objek penelitian, sehingga dapat memahami kondisi yang sebenarnya.
2. Wawancara yang dilakukan kepada informan dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan langsung dengan seluruh sumber data berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini berupa dokumen Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Republik Indonesia dan dokumen di KPP Pratama Tanjung Karang. Dokumen tersebut dapat menjadi sumber atau pokok yang menunjang dalam mengeksplorasi masalah penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi dan biasanya

diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman (1984:21-23) dalam Emzir (2010:129) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data (*data display*), dan penarikan / verifikasi kesimpulan sebagaimana yang terdapat pada gambar 2:

Gambar 2. Model Analisis Data Miles dan Hubermann



Sumber : Emzir 2010:134

Sesuai dengan model analisis data Miles dan Hubermann tersebut, peneliti bergerak diantara empat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak balik diantara reduksi data, model, dan penarikan/ verifikasi kesimpulan sehingga membentuk siklus interaktif. Verifikasi yang ingin didapatkan yaitu data yang telah teruji *validitasnya*.

J. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atas kehandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Licoln dan Guba dalam Emzir (2011:79) mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif. Kreiteria tersebut antara lain:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *memberchecking*.

Fungsi kredibilitas yaitu, Pertama, penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini kredibilitas digunakan dengan memastikan bahwa hasil dari penelitian ini dapat diterima dan dapat dipercaya untuk informasi mengenai pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Untuk melakukan triangulasi, peneliti harus mengenali data menggunakan beberapa metode dari sumber data (Martono 2015:323).

Ada beberapa keuntungan penggunaan triangulasi dalam penelitian yang dapat memperkuat hasil penelitian, sehingga memungkinkan kita menulis sebuah hasil penelitian yang lebih baik; (1) triangulasi memperkaya informasi, terutama ketika menulis desain penelitian. Triangulasi dalam studi pustaka dapat memperkuat argumentasi peneliti untuk mendapatkan suatu rumusan teori yang dapat digunakan dalam penelitian, sehingga ini dapat mencegah pemahaman yang salah mengenai suatu teori; (2) sumber informasi ditambahkan seringkali memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kekurangan sebuah topik yang ditemukan dalam data dari satu sumber. Ini akan terjadi ketika beberapa sumber data mengonfirmasi data yang sama; (3) beberapa sumber data memberikan verifikasi dan validitas dengan melengkapi data yang sama; (4) data yang diperoleh akan semakin komprehensif; (5) data dan informasi dapat didukung banyak sumber atau jenis penelitian. Hal ini akan membuat peneliti lebih mudah menganalisis data untuk menarik kesimpulan; (6) inkonsistensi dalam seperangkat data akan mudah dikenali dan (7) triangulasi dapat mengurangi terjadinya bias dan subjektivitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini triangulasi digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memenuhi data primer yang

tidak didapat melalui observasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung situasi yang terjadi dalam pelaksanaan dilokasi. Dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian.

Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kejadian yang sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah dokumentasi. Triangulasi disajikan dengan menampilkan dokumen, wawancara, observasi yang peneliti dapat selama melakukan penelitian.

b. Kecakupan Referensial

Kecakupan Referensial yaitu mengumpulkan berbagai catatan-catatan saat melakukan observasi, foto-foto dengan informan, dan rekaman-rekaman saat melakukan wawancara bersama informan. Catatan, foto dan rekaman tersebut dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif transferabilitas adalah tanggungjawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggungjawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal.

Dalam penelitian ini generalisasi berlaku jika terdapat program pengarusutamaan gender serta memiliki fasilitas seperti ruang laktasi, area bermain anak, parkir wanita, area merokok dan toilet terpisah. Hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk kasus diluar masalah yang diambil.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Dependabilitas menkankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut. Untuk mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap mengenai data-data yang didapat dilapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Kriteria konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian. Peneliti lain dapat mengambil suatu peran terhadap hasil penelitian. Setelah melakukan penelitian, seseorang dapat melakukan audit data yang menguji pengumpulan data dan prosedur analisis dan membuat penilaian tentang kemungkinan distorsi dan bias. Peneliti melakukan konfirmabilitas dengan mencari dan mengumpulkan data

serta membandingkannya terkait pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.

Peneliti selalu mendiskusikan hasil dilapangan dengan tim pembimbing mengenai data-data yang didapat dilapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat dalam melakukan konfirmasi tersebut. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini melakukan pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Lampung berdiri pada tahun 1963 dengan status Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung sedangkan Kantor Inspeksi Keuangan berkedudukan di Palembang jadi Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung merupakan Kantor yang ada di bawah Kantor Inspeksi Keuangan Palembang. Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung tahun 1964 ditingkatkan status menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Teluk Betung karena karisidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung. Di samping ekonominya sudah meningkat untuk hadirnya sebuah kantor dalam mengelola penerimaan pajak. Kantor Inspeksi Keuangan Teluk Betung Dengan adanya reorganisasi Direktorat Jendral Pajak diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung Pada tahun 1969. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/1989 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung Tepatnya pada tanggal 1 April 1989 dan pada tanggal 9 September 2008 sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-159/PJ/2008 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang. KPP Tanjung

Karang kemudian dipecah kembali menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diantaranya: KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Natar, dan KPP Pratama Teluk Betung.

2. Visi – Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

a. Visi KPP Pratama Tanjung Karang

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan moderen yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan Integrasi dan Profesionalisme yang tinggi.

b. Misi KPP Pratama Tanjung Karang

Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Azas dan Tujuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanjung Karang

Azas dan Tujuan Kantor Pelayanan Pajak terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3262). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).

4. Data Kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

Pegawai KPP Pratama Tanjung Karang merupakan asset penting pada setiap kantor Pelayanan Pajak, karena tumbuh berkembangnya instansi tersebut bergantung pada kinerja pegawai, dan pelaksanaan tugas masing-masing bagian secara maksimal dan profesional serta kerjasama yang baik dalam setiap bagian yang ada. KPP Pratama Tanjung Karang memiliki 92 pegawai yang mendukung kinerja KPP dan terdapat beberapa bagian kerja, yang terbagi kelompok jabatan fungsional: Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Ektensifikasi, Kepala Seksi PDI, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Waskon I, II, III, IV.

Tabel 2.

Kelompok Jabatan Fungsional *Account Representative* (AR)

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Tirto Nugroho	Kepala Kantor	Laki-Laki
2.	Amsori	Kepala Sub Bagian Umum	Laki-Laki
3.	Mohamad Apip	Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	Laki-Laki
4.	Atjep A mri Wahyudi	Kepala Seksi PDI	Laki-Laki
5.	Devy Mary Florence	Kepala Seksi Pelayanan	Perempuan

6.	Kamaluddin	Kepala Seksi Pemeriksaan	Laki-Laki
7.	Yahyono	Kepala Seksi Penagihan	Laki-Laki
8.	Muhammad Faisal	Kepala Seksi Waskon I	Laki-Laki
9.	Sri Handayani	Kepala Seksi Waskon II	Perempuan
10.	Suhono	Kepala Seksi Waskon III	Laki-Laki
11.	Andy Prijanto	Kepala Seksi Waskon IV	Laki-Laki
12.	Andi Asworo Retno	Supervisor	Laki-Laki

Sumber: *Sub Bagian Umum KPP Pratama Tanjung Karang 2018*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk jabatan fungsional diisi dengan laki-laki dan perempuan. Pengisian jabatan tersebut diisi oleh pegawai yang memiliki kemampuan pada bidang tersebut, melalui promosi jabatan dan tidak mempersoalkan jenis kelaminnya. Tidak hanya jabatan fungsional, jabatan kantorpun diisi oleh pegawai yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dari tingkat pendidikan yang beragam minimal SMU/ sederajat sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Daftar Pegawai KPP Pratama Tanjung Karang

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan Kantor	Jenis Kelamin
1	Abdur	D1	Pelaksana	Laki-Laki
2	Adima	D3	Pemeriksa Pajak	Laki-Laki
3	Adind	D3	Pelaksana	Perempuan
4	Adist	D3	Pelaksana	Perempuan
5	Agung	D1	Pelaksana	Laki-Laki
6	Agus	S1	Account Representative	Laki-Laki
7	Ahmad	D1	Pelaksana	Laki-Laki
8	Ahmad	S2	Kepala Kantor	Laki-Laki
9	All K	S1	Jurusita	Laki-Laki
10	Amali	D1	Pelaksana	Perempuan
11	Amsor	S1	Kepala Subbag	Laki-Laki
12	Andi	S1	Pemeriksa Pajak	Laki-Laki
13	Andy	S1	Kepala Seksi	Laki-Laki
14	Anggu	D3	Account Representative	Perempuan

15	Annis	D1	Pelaksana	Perempuan
16	Apud	S1	Account Representative	Laki-Laki
17	Arfin	D3	Pelaksana	Laki-Laki
18	Arif	D3	Account Representative	Laki-Laki
19	Arifi	S1	Pelaksana	Laki-Laki
20	Atjep	S2	Kepala Seksi	Laki-Laki
21	Bangu	S1	Pelaksana	Laki-Laki
22	Benny	S1	Account Representative	Laki-Laki
23	Dedy	D1	Bendahara Account Representative	Laki-Laki
24	Deswi	D1	Pelaksana	Perempuan
25	Devy	S2	Kepala Seksi	Perempuan
26	Dewi	D3	Account Representative	Perempuan
27	Dina	S1	Account Representative	Perempuan
28	Dio O	D3	Pelaksana	Laki-Laki
29	Duwi	D3	Pemeriksa Pajak	Laki-Laki
30	Ellis	D3	Pemeriksa Pajak	Perempuan
31	Euis	D3	Account Representative	Perempuan
32	Evita	D3	Pelaksana	Perempuan
33	Fadla	S1	Pemeriksa Pajak	Perempuan
34	Faisa	SMU	Pelaksana	Laki-Laki
35	Fardi	D1	Pelaksana	Laki-Laki
36	Fitri	S1	Account Representative	Perempuan
37	Frisn	D4	Account Representative	Perempuan
38	Furi	D4	Pemeriksa Pajak	Perempuan
39	Gusti	D3	Pelaksana	Laki-Laki
40	Hamda	D3	Jurusita	Laki-Laki
41	Harse	S1	Account Representative	Perempuan
42	Hendr	D3	Account Representative	Laki-Laki
43	Heru	D3	Account Representative	Laki-Laki
44	Hervi	S1	Pemeriksa Pajak	Perempuan
45	Intar	D3	Pelaksana	Perempuan
46	Iqbal	S1	Account Representative	Laki-Laki
47	Irfan	D1	Pelaksana	Laki-Laki
48	Ivana	D1	Pelaksana	Perempuan
49	Iwan	SMU	Pelaksana	Laki-Laki
50	Jaka	D3	Pelaksana	Laki-Laki
51	Kamal	S2	Kepala Seksi	Laki-Laki
52	Karul	S1	Pelaksana	Laki-Laki
53	Kemas	S1	Account Representative	Laki-Laki
54	Kgs M	D1	Account Representative	Laki-Laki
55	Linda	D1	Pelaksana	Perempuan

56	Lsrof	D3	Pemeriksa Pajak	Laki-Laki
57	M. Er	D1	Pelaksana	Laki-Laki
58	Moham	S2	Kepala Seksi	Laki-Laki
59	Moham	D3	Account Representative	Laki-Laki
60	Moham	S1	Penilai PBB	Laki-Laki
61	Muhai	S1	Account Representative	Laki-Laki
62	Muham	D1	Pelaksana	Laki-Laki
63	Muham	D3	Sekret Account Representativeis	Laki-Laki
64	Muham	D1	Pelaksana	Laki-Laki
65	Muham	S1	Kepala Seksi	Laki-Laki
66	Navis	D3	Pelaksana	Laki-Laki
67	Noer	S1	Pemeriksa Pajak	Laki-Laki
68	Nur R	S1	Pemeriksa Pajak	Perempuan
69	Nurma	S1	Pelaksana	Perempuan
70	Retno	S1	Account Representative	Perempuan
71	Rifri	S1	Pelaksana	Laki-Laki
72	Rika	S1	Pelaksana	Perempuan
73	Rizki	D3	Pelaksana	Laki-Laki
74	Rizki	D3	Pelaksana	Perempuan
75	Roni	S1	Account Representative	Laki-Laki
76	Sri H	S1	Kepala Seksi	Perempuan
77	Sri M	SMU	Pelaksana	Perempuan
78	Sri R	D1	Pelaksana	Perempuan
79	Suher	S1	Pelaksana	Laki-Laki
80	Suhon	S2	Kepala Seksi	Laki-Laki
81	Sunar	S1	Account Representative	Laki-Laki
82	Syaid	D1	Pelaksana	Perempuan
83	Syamr	S1	Account Representative	Laki-Laki
84	Tri S	D1	Pelaksana	Laki-Laki
85	Varya	D3	Pemeriksa Pajak	Laki-Laki
86	Wahyu	D3	Pelaksana	Laki-Laki
87	Waski	D3	Account Representative	Laki-Laki
88	Wilda	D4	Account Representative	Laki-Laki
89	Wisma	S2	Account Representative	Perempuan
90	Yahyo	S1	Kepala Seksi	Laki-Laki
91	Yayan	D3	Pemeriksa Pajak	Laki-Laki
92	Zuhdi	D4	Pemeriksa Pajak	Laki-Laki

Sumber: *Sub Bagian Umum KPP Pratama Tanjung Karang, 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai di KPP Pratama Tanjung Karang bervariasi dari jabatan, pendidikan dan jenis kelaminnya. Hal ini membuat kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Kemampuan menjadi penentu untuk seseorang mendapatkan pekerjaan dan tidak tergantung dari jenis kelaminnya.

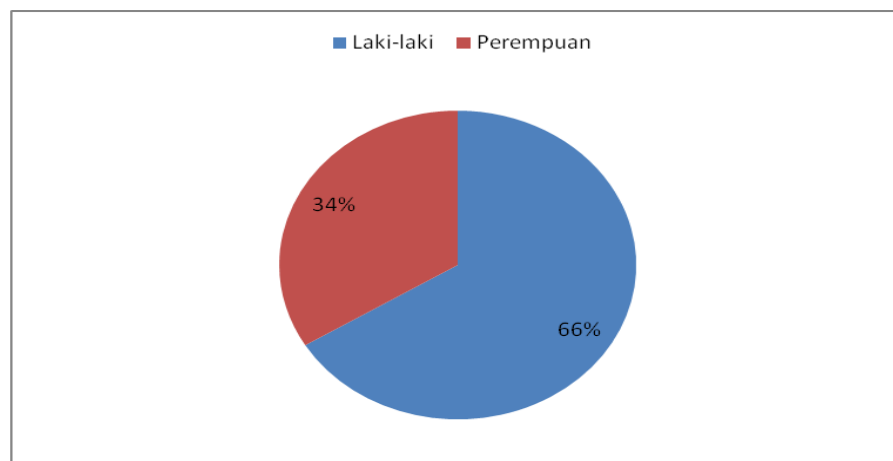
5. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

KPP Pratama Tanjung Karang sebagai kantor pelayanan pajak yang ada di kota Bandar Lampung didalam kinerjanya melayani masyarakat memiliki pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja tersebut berguna mempermudah bagi masyarakat atau Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan wilayah tinggalnya. Pada tahun 2013-2014 wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Karang meliputi wilayah : Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur dan Tanjung Karang . Pada Tahun 2015 terjadi perluasan wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Karang yang kini meliputi : Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Kec. Kedaton, Kec. Kemiling , Kec. Enggal, Kec. Langkapura, Kec. Kedamaian.

6. Data Persebaran Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

Data persebaran pegawai menunjukkan perbandingan jumlah antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan dan tingkat pendidikan pegawai yang bekerja di KPP Pratama Tanjung Karang melalui grafik. Data perbandingan komposisi antara laki-laki dan perempuan disajikan dengan grafik lingkaran sebagai berikut:

Gambar 3. Komposisi Pegawai

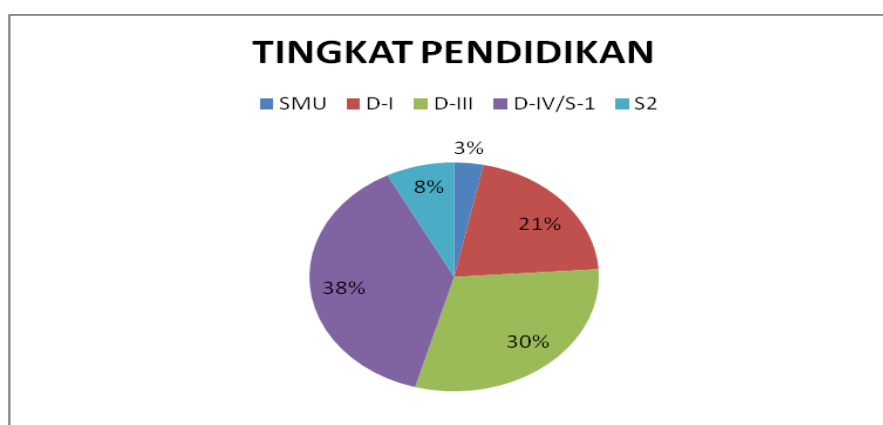


Sumber: *Sub Bagian Umum KPP Pratama Tanjung Karang 2019*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa komposisi laki-laki menduduki 66% sedangkan perempuan 34%. Dari 92 orang pegawai maka 66% menunjukkan angka 61 orang dan 34% menunjukkan 31 orang. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai yang bekerja di KPP Pratama Tanjung Karang terdiri dari 61 orang laki-laki dan 31 orang perempuan.

Pegawai di KPP Pratama Tanjung Karang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda namun penempatan posisi pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan tingkat pendidikan minimal SMU/ sederajat. Kesetaraan dalam penempatan jabatan bukan dilihat dari apakah dia laki-laki atau perempuan, bukan karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi, namun dari keahlian yang ia miliki. Dalam suatu jabatan dapat diisi dengan laki-laki atau perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Namun berbeda dalam pengisian untuk jabatan fungsional, karakteristik untuk mengisi jabatan fungsional minimal memiliki pendidikan D-IV/S-1 karena jabatan ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bawahannya sehingga tingkat pendidikan menjadi bahan pertimbangan.

Gambar 4. Tingkat Pendidikan



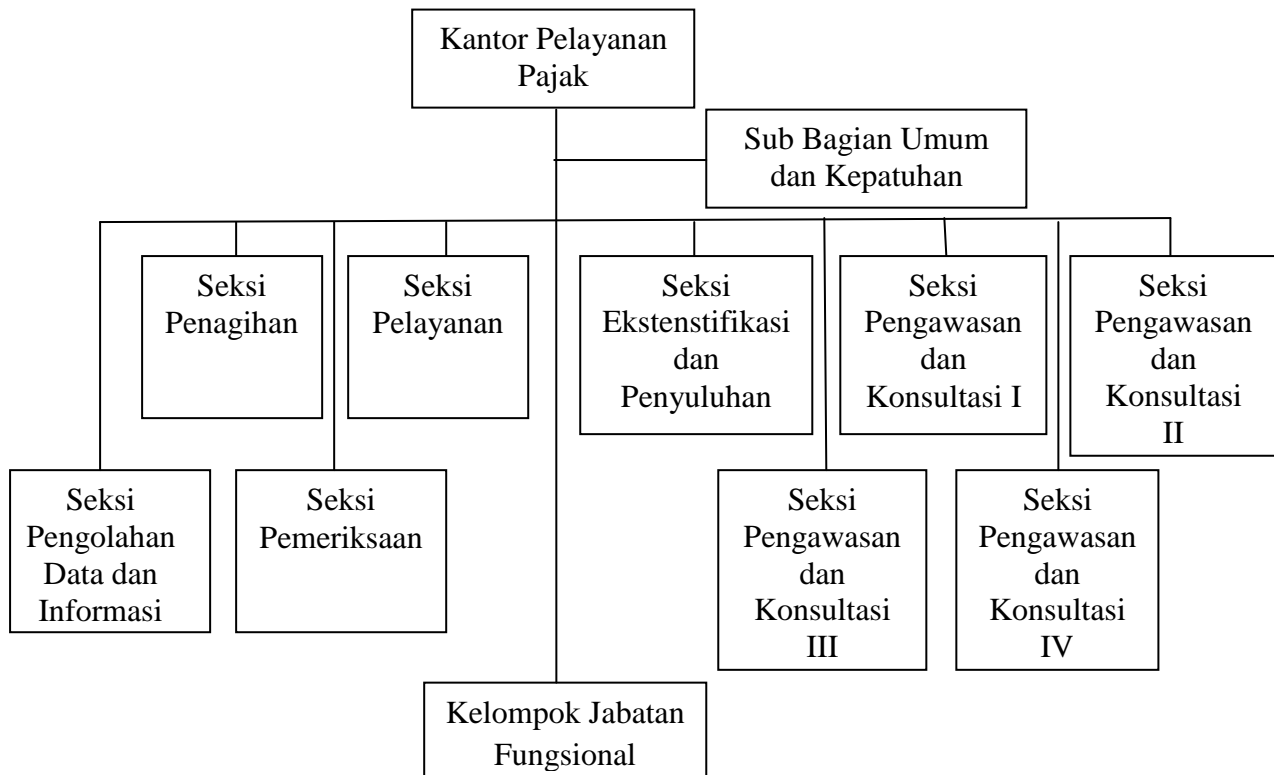
Sumber: *Sub Bagian Umum KPP Pratama Tanjung Karang 2019*

Dari gambar diatas dapat dilihat perbandingan tingkat pendidikan pegawai di KPP Pratama Tanjung Karang yang disajikan melalui grafik

lingkaran. Dari 92 pegawai maka dapat diketahui bahwa terdapat 3% pegawai berpendidikan SMU yaitu 3 orang, 21% pegawai berpendidikan D-I yaitu 19 orang, 30% pegawai berpendidikan D-III yaitu 28 orang, 38% pegawai berpendidikan D-IV/S-1 yaitu 35 orang dan 8% pegawai berpendidikan S-2 yaitu 7 orang.

7. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

Struktur organisasi menunjukkan pembagian jabatan secara vertikal dan horizontal. Terdapat beberapa penempatan untuk pegawai dapat dilihat dari bagan dibawah ini:



B. Gambaran Umum Pengarusutamaan Gender di KPP Pratama Tanjung Karang

1. Program-Program Pengarusutamaan Gender

a. Program Cuti Melahirkan dan Cuti Menemani Melahirkan

Program cuti melahirkan dan cuti menemani melahirkan yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang merupakan hak pegawai yang dapat diambil ketika ingin melahirkan dan menemani melahirkan. Untuk cuti melahirkan selama tiga bulan sejak tanggal cuti dibuat sedangkan untuk cuti menemani melahirkan berlaku selama sepuluh hari dari tanggal yang diajukan.

b. Program Kesetaraan

Program kesetaraan terbagi atas kesetaraan pelayanan dan kesetaraan kesempatan. Program kesetaraan pelayanan yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang merupakan pemberian pelayanan yang sama terhadap Wajib Pajak (WP) tanpa membedakan bagi perempuan maupun laki-laki. Selain kesetaraan pelayanan untuk wajib pajak, kesetaraan kesempatan bagi pegawai juga dipenuhi oleh KPP Pratama Tanjung Karang. Para pegawai memiliki kesetaraan kesempatan untuk berkarir dan menempuh pendidikan.

c. *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training*

Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang adalah pemberian pengetahuan, *skill* dan kompetensi. *Internalisasi Corporate Value and Inhouse*

Training yang ada antara lain pelatihan bahasa Inggris, kuliah umum perpajakan, kampanye simpatik, *coffee morning*, pelatihan *make up* dan pengajian. Hal ini diperuntukan agar pegawai dapat memperdalam ilmu baik dalam pengetahuan baik terkait pekerjaan maupun pengembangan diri.

2. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung adalah fasilitas yang disediakan oleh KPP Pratama Tanjung Karang untuk digunakan oleh wajib pajak dan pegawai. Fasilitas yang disediakan untuk wajib pajak antara lain ruang laktasi, parkir wanita, area merokok, area bermain anak, toilet dan loket khusus sedangkan fasilitas untuk pegawai adalah parkir wanita dan toilet terpisah. Fasilitas ini disediakan untuk mempermudah mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan saat berada di KPP Pratama Tanjung Karang.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Program Pengarusutamaan Gender
 - a. Melahirkan merupakan sifat alamiah yaitu *nature* setiap perempuan sedangkan menemani melahirkan merupakan sifat *nurture* setiap laki-laki. Kebiasaan dilingkungan bahwa suami menemani istrinya melahirkan telah terpenuhi di KPP Pratama Tanjung Karang. Hak-hak para pegawai akan kebutuhan gender *nature* dan *nurture* pun tercapai.
 - b. Dengan adanya pengarusutamaan gender maka kini laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama diranah publik dan pendidikan. Keadilan dalam mendapatkan suatu pelayanan juga telah diterapkan sehingga kebutuhan seseorang terpenuhi karena ada pihak-pihak yang harus lebih didahulukan karena mempunyai keterbatasan yaitu lansia, ibu hamil dan difabel.
 - c. *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training* untuk menambah pengetahuan, *skill* dan kompetensi bagi para pegawai di KPP Pratama Tanjung Karang baik terkait pekerjaan maupun pengembangan diri. Hal tersebut penting untuk menambah kemampuan mereka dalam bekerja maupun bagi individu.

- d. Fasilitas yang ada dalam program pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang sudah sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Fasilitas yang disediakan telah memahami bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan memang berbeda dan harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.
 - e. Pelaksanaan pengarusutamaan gender memiliki anggaran yang juga responsif gender.
2. Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender
- a. Proses cuti melahirkan dan cuti menemani melahirkan sama saja setelah mengajukan dan disetujui oleh atasan maka otomatis terekam disistem. Perbedaannya terletak pada rentang waktu cuti. Untuk melahirkan selama tiga bulan dan untuk menemani melahirkan selama 10 hari.
 - b. Pelaksanaan program kesetaraan kesempatan sangat dirasakan manfaatnya bagi para pegawai. Kesempatan berkarir dan memperoleh jabatanpun menjadi terbuka lebar bagi laki-laki maupun perempuan.
 - c. Fasilitas yang ada sudah cukup baik karena telah memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda-beda.
 - d. Pelaksanaannya Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training sudah sesuai sebagaimana pengarusutamaan gender karena kebutuhan para pegawai tercapai dengan adanya pengembangan diri dan pengetahuan yang disediakan oleh kantor

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KPP Pratama Tanjung Karang.

- e. Pelaksanaan anggaran Pengarusutamaan Gender ada disetiap kegiatan yang menyangkut pengarusutamaan gender. Anggaran ini telah dirincikan setiap pelaksanaan suatu kegiatan dan pemenuhan fasilitas yang melingkupi pengarusutamaan gender.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

- a. Pengarusutamaan gender bukan hanya soal jenis kelamin, tetapi soal pemenuhan kebutuhan. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sudah dimasukkan kedalam PMK No.93/PMK.01/ 2018.
- b. Kebijakan tentang pengarusutamaan gender yang diterapkan sudah baik dilihat dari kebijakan serta sarana yang disediakan. Fasilitas yang disediakan guna memenuhi kebutuhan praktis internal maupun eksternal. Untuk rencana 5 tahunan langsung dibuat dipusat bukan di KPP lagi dan untuk kebijakannya semakin bertambah karena awal hanya ada parkir wanita dan toilet, sekarang sudah ada juga ruang laktasi, area merokok, tempat bermain anak dan loket khusus.
- c. Dukungan sistem informasi yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang sudah baik karena telah disosialisasikan secara eksternal dan maupun internal, data terpilah juga telah tersedia, pelaksanaan

komunikasi, informasi, dan edukasi internal maupun eksternal juga telah tersampaikan.

- d. Sumber daya manusia yang ada sudah mampu untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. Pemahaman mereka terhadap PUG dapat meningkatkan kinerja terhadap pelaksanaan program.
- e. Semua lapisan pegawai bersama-sama membantu pelaksanaan pengarusutamaan gender, untuk lebih spesifik terdapat di Subbagian Umum sebagai pengadaan dan Seksi Pelayanan sebagai fungsi penjagaan.
- f. Kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga sosialisasi perlu dilakukan lagi oleh pihak kantor agar para wajib pajak mengetahui bahwa KPP Pratama Tanjung Karang telah menerapkan pengarusutamaan gender, dengan sosialisasi yang dilakukan melalui pendekatan kemasyarakatan diharapkan wajib pajak jadi lebih memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.
- g. Program yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang telah responsif gender dan tidak hanya untuk pegawai namun juga untuk wajib pajak. Program yang dijalankan juga memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang sudah baik dilihat dari kebijakan, program, pemantauan dan pemenuhan fasilitas yang ada. Kekurangannya ada pada fasilitas toilet yang tidak dibedakan, parkir wanita dan area merokok yang disediakan.

Faktor pendukung terselenggaranya pengarusutamaan gender dapat dilihat dari dukungan politik, dukungan kebijakan, dukungan informasi, dukungan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Dukungan tersebut dilakukan sehingga pengarusutamaan gender yang dilaksanakan sudah cukup baik, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta beberapa fasilitas yang kurang sesuai yaitu parkir wanita, area merokok dan toilet.

B. Saran

1. Program pengarusutamaan gender yang ada sudah cukup baik namun ada beberapa fasilitas yang sebaiknya dihilangkan seperti area merokok dan parkir wanita. Merokok yang bukan merupakan kebutuhan namun kebiasaan dan dilokasi parkir wanita telah disediakan petugas yang memarkirkan sehingga wanita tidak parkir sendiri. Selain itu toilet juga harus lebih diperhatikan agar dibedakan sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
2. Sosialisasi perlu ditingkatkan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender yang ada di kantor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Demartoto, Argyo, 2009, *Kebutuhan Strategis Praktis Gender*, Surakarta, Sebelas Maret University Press

Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persana

Fakih, Mansour, 2004, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Martono, Nanang, 2016, *Metode Penelitian Sosial : Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Partini, 2013, *Bias Gender dalam Demokrasi*, Yogyakarta, Tiara Wacana

Rapar J.H, 2001, *Filsafat Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Remiswal, 2013, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Scott, John, 2013, *Sosiologi; The Key Concepts*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Sri Mastuti et .al., 2007, *Anggaran Responsif Gender*, Jakarta, Civic Education and Budget transparency Advocation (CiBa)

Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta

Zainuddin M, Masyhuri, 2008, *Metodologi Penelitian*, Bandung, PT Refika Aditama

Dokumen:

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan

Anjas Asmara (2016) *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*

Perdesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013)

Mutiara Septiani Eka Putri (2018) Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan di Provinsi Lampung

Jurnal:

Tresiana, Novita, Perumusan Kebijakan Pendidikan yang Bersperspektif gender di Provinsi Lampung, Jurnal Borneo Administrator Volume 11 No. 2 Tahun 2005

Website:

<http://digilib.unila.ac.id/13311/14/BAB%20II.pdf> diakses pada 30 September 2018

<http://digilib.unila.ac.id/3987/15/BAB%20II.pdf> diakses pada 30 September 2018

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/51014-35739-1.-pengarusutamaan-gender.pdf> diakses pada 30 September 2018

<https://www.subangbaru.com/responsif-gender-kpp-pratama-harus-dicontoh-kantor-lain/> diakses pada 16 Agustus 2018

<http://digilib.unila.ac.id/13963/18/BAB%20IV.pdf> diakses pada 04 Oktober 2018

<http://eprints.uny.ac.id/9785/3/Bab%203%20-%2005101241004.pdf> diakses pada 04 Oktober 2018

<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=M2IzZTM5MTg1NDY0MDQ4OTc0YTBhYjc2&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTcvMDgvMTUvM2IzZTM5MTg1NDY0MDQ4OTc0YTBhYjc2L2thamlhbi1hd2FsLWluZGVrcy1rZXRpbXBhbmdhbi1nZW5kZXItMjAxNi5odG1s&towardfnoarfeauf=MjAxOC0xMC0wNyAyMjoxMzozNQ%3D%3D> diakses pada 07 Oktober 2018

http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf diakses pada 08 Oktober 2018